BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tuntutan transparansi dalam sistem Pemerintahan semakin meningkat pada era otonomi daerah saat ini, tanpa terkecuali pada Pemerintah Daerah. beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah berusaha untuk membudayakan tranparansi di daerahnya dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur khusus tentang transparansi. Hal ini disebabkan oleh ditetapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No.33 tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi kepada Publik. Bahkan sebelum adanya UU No.14 Tahun 2008 beberapa daerah telah menerbitkan Perda tentang transparansi dan partisipasi masyarakat. Ketiga Undang – Undang diatas memberikan peluang bagi pemerinah daerah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, dana, serta sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Sebagai konsekuensinya pemerintah daerah harus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah agar masyarakat tahu tentang pengalokasian keuangan daerah di tempat tinggal mereka.

Transparansi sendiri adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (PP RI Nomor 71 tentang SAP, 2010)

Seperti pada keterangan diatas, sebelum adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pada Publik beberapa daerah telah menerbitkan Perda tentang transparansi laporan keuangan. Di Indonesia setidaknya ada12 kabupaten / kota yang telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait tentang transparansi laporan keuangan dan partisipasi masyarakat. Beberapa daerah yang telah memiliki Perda terkait dengan transparansi diantaranya Kabupaten Lebak, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Solok, Kabupaten Magelang, Kota Surabaya, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Surakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat menyadari pentingnya transparansi dalam tata kelola keuangan daerah (http://www.radarbanten.com). Namun, pada prakteknya peraturan – peraturan daerah ini masih sulit untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah terutama OPD sebagai level pelaksana.Transparansi pada hakikatnya dapat memberi pengaruh positif pada organisasi secara khusus dan daerah secara umum. Kebanyakan perda tentang transparansi yang sudah ada belum memiliki sanksi, sehingga masih sulit dalam pelaksanaan serta penegakannya. Oleh karena itu, butuh komitmen yang tinggi oleh segenap jajaran pemerintah daerah dalam untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangan.

Tekanan institusional cenderung berkembang dimana pengukuran dan kontrol yang lemah atau tidak tepat, yaitu dimana akuntabilitas rendah (Ridha dan Basuki, 2012). Tidak adanya transparansi publik akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas dan dapat merugikan masyarakat. Dampak negatif yang akan timbul dikarenakan tidak adanya transparansi adalah dapat menimbulkan distorsi dalam alokasi sumber daya memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat, menyuburkan praktik – praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Pada tahun 2018, tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Indonesia menempati peringkat ke – 96 bersama Brazil, Kolombia, Panama, Peru, Thailand, dan Zambia. Sedangkan di Asia Tenggara, Indonesia berada dibawah Singapura (6), Brunei Darussalam (32), Malaysia (62), dan bahkan Timor Leste (91) (http://internasional.kompas.com). Hal ini dapat dijadikan salah satu gambaran bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan di Indonesia masih sangat rendah.

Di wilayah Eks Karisidenan Pati sendiri sudah ada beberapa kabupaten yang sudah melaksanakan prinsip transparansi untuk menekan kebocoran anggaran. Contoh nya di kabupaten Kudus sendiri. Kabupaten Kudus sendiri telah dijadikan kabupaten percontohan untuk penerapan sistem elektronifikasi keuangan oleh Bank Indonesia (BI). Karena BI menilai Kudus bisa menekan kebocoran anggaran. Dengan sistem elektronifikasi atau pembayaran non tunai semua aliran dana yang masuk dan keluar cukup transparan dan bisa dipantau. Transparannya aliran dana pemerintah, juga

bisa berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga nantinya terdapat dana untuk pembangunan di Kudus yang berdampak pada meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sistem pembayaran non tunai ini telah dilakukan dari pengguna anggaran di masing – masing OPD di Kabupaten Kudus (http://kudusnews.com).

Penelitian Masruroh dan Praptoyo (2015) tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Adanya peraturan digunakan untuk mengatur praktik yang ada menjadi lebih baik. Ketidakpastian lingkungan adalah situasi disekitarnya sehingga mencoba untuk melakukan sesuatu untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Ketidakpastian dapat disebabkan oleh berbagai hal di luar organisasi, seperti perubahan peraturan yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, adanya peraturan yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan lain sebagainya.

Penelitian Andriyani (2016) tekanan eksternal, komitmen manajemen, gaya kepemimpinan, dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah. Tekanan eksternal yang terbentuk dari luar seperti adanya peraturan pemerintah, tekanan masyarkat, ataupun dorongan dari pihak tertentu mempercepat proses transparansi untuk dilaksanakan dalam penyajian laporan keuangan. Gaya kepemimpinan dalam instansi pemerintah dapat membantu menerapkan transparansi pelaporan keuangan, karena seorang

pemimpin akan sangat mempengaruhi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan, dalam mencapai tujuan instansi pemerintah yang dipimpinnya. Tingginya tingkat aksesibilitas atas laporan keuangan daerah atau OPD maka menunjukkan semakin tinggi pula terwujudnya transparansi pelaporan keuangan.

Penelitian Fardian (2014) faktor politik, ketidakpastian lingkungan, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Pentingnya peran faktor politik dalam menciptakan organisasi public baik, karena dapat mendorong terciptanya sebuah penerapan transparansi pelaporan keuangan yang baik. Isomorfisme Normative terbentuk karena adanya tuntutan dari stakeholders terhadap organisasi yang dilakukan dengan profesionalitas. Profesionalitas merupakan bentuk dari adanya kompetensi sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi, pada peningkatan kinerja.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang kurang memuaskan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andriyani (2016). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, penelitian ini menambahkan variabel lain yaitu faktor politik dan kompetensi sumber daya manusia. Penambahan variabel ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana faktor politik mempengaruhi tingkat penerapan transparansi pelaporan keuangan yang telah dilaksanakan oleh BPPKAD di Eks –

Karisidenan Pati. Sedangkan variabel kompetensi sumber daya manusia ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pelatihan yang dilakukan oleh pihak BPPKAD kepada karyawan nya untuk mewujudkan transparansi pelaporan keuangan

Kedua, perbedaan pada objek penelitian ini adalah BPPKAD Se – Eks Karisidenan Pati yang terdiri dari 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora, sedangkan objek penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh Andriyani adalah OPD di Kabupaten Pelalawan. Pengambilan sampel pada OPD Se – Eks Karisidenan Pati yang terdiri dari 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora dilakukan karena peneliti ingin mengetahui tingkat penerapan transparansi pelaporan keuangan di BPPKAD Se – Eks Karisidenan Pati yang terdiri dari 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora

Ketiga, perbedaan pada metode pengambilan sampel. Jika pada penelitian yang dilakukan Andriyani pengambilan sampel menggunakan metode sensus yaitu seluruh populasi dijadikan sampel penelitian, maka pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel menggunakan kriteria dalam menentukan sampel penelitian ini.

Maka berdasarkan latar belakan yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan BPPKAD yang berjudul **"Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Ketidakpastian Lingkungan, Gaya Kepemimpinan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Faktor Politik terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada BPPKAD Se – Eks Karisidenan Pati)."**

1.2 Ruang Lingkup

Untuk memudahkan dalam di peneltian ini dan sesuai dengan tujuan penelitian , maka penulis membatasi ruang lingkup pokok bahasan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

a. Obyek penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Se-Karisidenan Pati yang terdiri dari 5 Kabupaten yaitu Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora
b. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan ditinjau dari tujuh faktor, yaitu Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Ketidakpastian Lingkungan, Gaya Kepemimpinan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Faktor Politik.
c. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, dan

responden dalam penelitian ini yaitu staff / pegawai yang berkecimpung didalam bidang keuangan.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu : Kurang efektifnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah, tingkat korupsi di Indonesia yang masih tinggi, kurangnya kesadaran oleh segenap pemerintah daerah tentang pentingnya transparansi. Dengan adanya permasalahan utama diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Tekanan Eksternal berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan?
2. Apakah Komitmen Manajemen berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan?
3. Apakah Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan?
4. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan?
5. Apakah Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan?
6. Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan?
7. Apakah Faktor Politik berpengaruh signifikan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diperoleh rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitin ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris bahwa Tekanan Eksternal berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
2. Untuk membuktikan secara empiris bahwa Komitmen Manajemen berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
3. Untuk membuktikan secara empiris bahwa Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
4. Untuk membuktikan secara empiris bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
5. Untuk membuktikan secara empiris bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
6. Untuk membuktikan secara empiris bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.
7. Untuk membuktikan secara empiris bahwa Faktor Politik berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan akan penerapan transparansi pelaporan keuangan BPPKAD.
2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan BPPKAD.
3. Bagi Civitas Akademika Universitas Muria Kudus penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya tentang penerapan transparansi pelaporan keuangan.
4. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.